Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap

Monik Ajeng Puspitoarum D.W^{a *}

^a Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 02 Maret 2017

Revisi pertama tanggal: 13 Juli 2017

Diterima tanggal: 22 Agustus 2017

Tersedia *online* tanggal: 31 Agustus 2017

Keywords: Planning, Development, Food Crops, Musrenbang, Innovation

ABSTRACT

This paper examines the process of agricultural development planning of food crops in Cilacap Regency and application of innovation in planning. Result of this research indicates that planning process in Cilacap Regency is dominated by technocratic and top-down approach through 'musrenbang'. The proposed programs and activities generated by technocratic approach are more in numerous comparing to those delivered by musrenbang process. Lack of farmer groups involvement in planning process cause this problem. Development planning of food crops agriculture in Cilacap has not considered innovation optimally in the planning process. The application of technology is carried out as a routine program implementation.

INTISARI

Tulisan ini menganalisis proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap dan penerapan inovasi dalam perencanaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap didominasi pendekatan teknokratik dan *top down*. Usulan program dan kegiatan hasil teknokratik lebih banyak jika dibandingkan usulan hasil musrenbang, hal tersebut diakibatkan karena kurangnya keterlibatan kelompok tani dalam proses perencanaan. Perencanaan Pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap belum mempertimbangkan inovasi secara optimal dalam proses perencanaannya. Penerapan teknologi dilakukan sebagai pelaksanaan program yang bersifat rutinitas.

2017 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Perencanaan yang baik diyakini dapat mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Todaro (2006) bahwa kegagalan pembangunan atau perkembangan yang memprihatinkan bersumber dari kegagalan proses perencanaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal dibutuhkan perencanaan yang baik.

Teori perencanaan sendiri merupakan subjek studi yang sulit dipahami. Pemahaman tentang teori perencanaan (*planning theory*) mengalami perdebatan yang panjang dan luas, karena pemahamannya menjadi semakin melebar dan kompleks. Dalam perkembangannya, ternyata teori perencanaan tidak dapat berdiri sendiri untuk merespon kejadian-kejadian tak terduga tersebut. Teori perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal observing

* Corresponding author. Tel.: +62-853-9988-5705; e-mail: eh_momon@yahoo.com

sekaligus media penjelas, seperti: ilmu sosial, matematika, lingkungan, *civil engineering*, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning*. Sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning* (Faludi, 1973). Perencanaan yang efektif merupakan suatu kolaborasi antara perencanaan prosedural dengan perencanaan substantif.

Perencanaan prosedural lebih mengarah pada perencanaan teknokratik di mana perencana merasa bahwa dengan teknik-teknik yang dimilikinya mereka mampu memecahkan berbagai masalah karena dapat melihat kerumitan masalah dengan lebih rasional. Namun, pengidentifikasian masalah yang dilakukan oleh perencana dianggap belum cukup tepat dalam menentukan masalah yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, perlu didukung dengan perencanaan substantif di mana masyarakat sebagai sasaran atau aktor lain yang terkait dan lebih mengetahui keadaan yang mereka alami dapat memberikan masukan dalam proses perencanaan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap tingkat pemerintahan memiliki porsi kewenangan masing-masing dalam perencanaan pembangunan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya bukan semata-mata karena keterbatasan sumber dana pembangunan atau terbatasnya sumber daya alam atau lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki, tetapi faktor manajemen pembangunan yang diterapkan turut memberikan kontribusi. Manajemen pembangunan tidak terlepas dari sistem perencanaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pembangunan yang menstimulasi terjadi pertumbuhan, baik dalam ekonomi, sosial budaya, dan pelayanan publik.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting peranannya di dalam perekonomian. Salah satu subsektor pertanian yang memegang peranan strategis dalam memelihara stabilitas ekonomi nasional adalah pertanian tanaman pangan. Tanaman pangan memegang peranan penting sebagai pemasok kebutuhan konsumsi penduduk.

Dalam era globalisasi dan persaingan bebas, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk lebih fokus dan inovatif dalam mencapai pembangunan. Tantangan pembangunan menjadi lebih kompleks dalam berbagai

sektor. Dari aspek pertanian, para petani harus bersaing tidak hanya dengan petani dalam negeri tetapi juga dengan petani negara lain. Karena globalisasi tidak memungkinkan suatu negara untuk menutup pasar dalam negeri mereka bagi produk-produk pertanian luar negeri. Untuk dapat *survive* para petani harus berani mengambil resiko dalam berinovasi. Inovasi akan menjamin peningkatan produktivitas, yang akan mempengaruhi tingkat survival jika harus bersaing dengan negara lain. Selain itu juga diperlukan dukungan pemerintah terutama dalam hal visi dan kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam hal pembangunan pertanian dibutuhkan perubahan visi dan kebijakan dari pemerintah dan aparat pelaksana dalam memahami proses-proses yang hakiki dari suatu pembangunan pertanian, yaitu proses pokok yang mendasar yang dapat mempengaruhi pembangunan pertanian.

Penulis tertarik menganalisis mengenai perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan karena pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap mempunyai lahan sawah terluas di Jawa Tengah dengan potensi pertanian yang cukup tinggi terutama tanaman pangan. Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang berkontribusi besar dalam ketahanan pangan di Jawa Tengah. Dalam era globalisasi dan persaingan bebas, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk lebih fokus dan inovatif dalam pembangunan. Pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap diawali dengan perencanaan. Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap diharapkan dapat menghadirkan perbaikan yang lebih baik di masa depan.

2. Teori

2.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Teori perencanaan merupakan subjek studi yang sulit dipahami. Pemahaman tentang teori perencanaan (*planning theory*) mengalami perdebatan yang panjang dan luas, karena pemahamannya menjadi semakin melebar dan kompleks. Apa itu teori perencanaan menjadi sulit didefinisikan secara pasti karena beberapa alasan, diantaranya (Campbell. S & Fainstein. S, 1996):

- a) Teori perencanaan memiliki over-lap dengan berbagai disiplin ilmu lain (ilmu sosial, politik, ekonomi, arsitektur, dll);
- b) Batasan profesi perencana dan profesi lainnya sering tidak jelas, di mana perencana tidak hanya membuat rencana dan bukan perencana dapat mengerjakan perencanaan;
- c) Ruang perencanaan terbagi atas pola ruang dan lingkungan alam yang luas; dan

d) Banyak pendekatan yang dapat dipakai dalam perencanaan dengan meminjam alat analisis, metode, dan teori dari bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Masalah ketidakjelasan teori perencanaan tersebut menimbulkan dualisme dalam teori perencanaan yaitu *theory of planning* dan *theory in planning*. *Theory in planning* disebut sebagai *substantive theory* membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal observing sekaligus media penjelas, seperti; ilmu sosial, matematika, lingkungan, *civil engineering*, arsitektur dan lain-lain. Sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning*. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Faludi (1973) dalam bukunya *Planning Theory*. Dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan antara *theory of planning* dan *theory in planning*. Justru diharapkan keduanya akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh Faludi (1973) disebut sebagai perencanaan efektif.

Teori perencanaan dapat dijadikan kerangka berpikir dalam memahami makna dan definisi perencanaan. Berdasarkan teori yang telah dibahas tersebut, perencanaan dianggap sebagai kumpulan prosedur. Perencanaan merupakan aplikasi dari metode ilmiah untuk membuat kebijaksanaan. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Abe (2005), perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi-potensi, faktor-faktor internal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan juga merupakan proses suatu rangkaian kegiatan. Perencanaan sebagai proses berarti bahwa perencanaan tidak hanya terfokus pada akhir proses itu sendiri tetapi pada keseluruhan proses kegiatan. Seperti yang dikemukakan oleh Reiner dan Davidoff dalam Faludi (1986), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Di dalam perencanaan, proses merupakan sesuatu yang bersinambungan (*planning is a continuous proces*).

Proses perencanaan Conyers dan Hills terbagi menjadi 6 tahap perencanaan. Dalam setiap tahap perencanaan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Sehingga penting untuk memahami setiap tahap yang ada dalam proses perencanaan: (a) *The decision to adopt planning*, (b) *Collect and analyse data*, (c) *Identifying alternatives course of action*, (d) *Plan and project appraisal*, (e) *Implement*, (f) *Monitoring and evaluation*.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan di mana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004) yaitu suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk

melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, melainkan perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Kuncoro, 2012).

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abe (2005), perencanaan daerah merupakan proses menyusun langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerinatah daerah, dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan daerah dapat dipandang sebagai formulasi (rumusan) mengenai aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka mencapai suatu kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah-langkah pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penjelasannya menerangkan bahwa: Sistem perencanaan pembangunan daerah mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

a) Pendekatan Politik

Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik.

b) Pendekatan Teknokratik

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

c) Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.

d) Pendekatan *Top-Down*

Hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan secara hirarki pemerintahan dari atas ke bawah.

e) Pendekatan *Bottom-Up*

Hasil perencanaan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan secara hirarki pemerintahan dari bawah ke atas. Proses *top-down*

versus *bottom-up* lebih mencerminkan proses perencanaan di dalam pemerintahan yaitu dari lembaga/departemen dan daerah ke pemerintah Pusat.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) menyebutkan bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a) Faktor Lingkungan

Faktor-faktor lingkungan dapat berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal), yang mencakup bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.

b) Faktor Sumber Daya Manusia Perencana

Perencana selaku sumber daya manusia perencanaan merupakan faktor utama yang menggerakkan pelaksanaan perencanaan. Kualitas perencanaan yang baik sangat tergantung pada kemampuan, keahlian dan keluwesan dari para perencananya selain teknik dan metode yang digunakannya.

c) Faktor Sistem Yang Digunakan

Sistem perencanaan pembangunan biasanya dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh suatu negara, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun politik. Sistem perencanaan yang dimaksud merupakan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah sebagai landasan atau dasar pelaksanaan pembangunannya.

d) Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan dalam upaya pencapaian pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembangunan saling mempengaruhi satu sama lain tanpa mengenal batas akhir.

e) Faktor pendanaan

Pada dasarnya pendanaan merupakan faktor yang sudah given, yaitu faktor yang memang harus ada dalam melakukan suatu kegiatan atau program.

2.2 Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan

Hakekat pembangunan menurut Banoewidjojo (1983) adalah terciptanya terus menerus perubahan-perubahan sosial/ struktur sosial serta pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Dalam rangka pembangunan, segala kegiatan harus ditumpahkan demi pembaharuan sosial serta pertumbuhan ekonomi atau kehidupan yang lebih baik.

Dibidang pertanian, dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian merupakan suatu proses perubahan tingkat kehidupan ekonomi dan sosial bagi masyarakat petani, serta menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kegiatan bidang pertanian. Lebih lanjut, pembangunan pertanian menurut Banoewidjojo (1983) adalah proses penciptaan

perubahan sosial penduduk secara terus menerus terutama diarahkan pada segi-segi pertanian, masyarakatnya diajak maju sehingga semakin pandai, semakin terampil, bersemangat, dan tekun sehingga produktivitas pertanian semakin meningkat. Pembangunan sering kali diartikan sebagai pertumbuhan dan perubahan. Soekarwati (1995) menyatakan bahwa pembangunan pertanian dapat berhasil jika terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani menjadi lebih baik.

Pembangunan pertanian dimulai dengan perencanaan pembangunan pertanian. Perencanaan pembangunan pertanian merupakan perencanaan pembangunan daerah dari segi pertanian. Proses perencanaan pembangunan pertanian sejalan dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Banoewidjojo (1983) mengemukakan tahapan rencana pembangunan pertanian sebagai berikut: (a) Menetapkan tujuan atas dasar pertimbangan keadaan; (b) Membuat analisa masalah-masalah yang akan timbul, sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan; (c) Memecahkan masalah-masalah dan memilih alternatif yang paling memungkinkan di antara jawaban masalah-masalah tersebut; (d) Mengatur segala sarana berdasarkan alternatif jawaban masalah-masalah yang telah dipilihnya itu, dengan tepat menurut jenis, jumlah, tempat dan waktu dalam bentuk rencana; (e) Mencoba melaksanakan rencana; dan (f) Membuat perubahan-perubahan berdasarkan hasil-hasil percobaan.

2.3 Inovasi dan Sistem Inovasi

Rogers dalam Noor (2013) berpendapat bahwa inovasi merupakan perubahan yang direncanakan yang bertujuan untuk memperbaiki praktek-praktek. Inovasi organisasi tidak perlu harus menemukan sesuatu yang baru atau proses yang mereka adopsi untuk dikatakan inovatif. Inovasi dapat saja perbaikan terhadap organisasi yang diterapkan dan diimplementasikan di organisasi tersebut.

Dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan proses atau hasil kreativitas pembaruan/ perbaikan yang dapat memberikan manfaat. Melalui inovasi kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang bernilai kurang untuk mencapai hasil yang bernilai lebih besar. Inovasi dapat dikembangkan pada level individu, institusi dan kebijakan (Noor, 2013).

Inovasi merupakan faktor yang dapat berpengaruh pada tercapainya perencanaan pembangunan. Inovasi merupakan isu strategis yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pertanian. Perencanaan efektif dengan mempertimbangkan inovasi dapat berkontribusi pada kreativitas dan keberhasilan inovasi (Mumford et al, 2008).

Strategi pembangunan inovasi di Indonesia dilaksanakan melalui penguatan sistem inovasi. BPPT (2012) mengutip Freeman (1987) menyebutkan bahwa sistem inovasi adalah jejaring kelembagaan dalam sektor publik dan swasta dimana kegiatan-kegiatan dan interaksi-interaksinya memulai, mendatangkan, mengubah, dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. Kemudian Taufik (2010) mendefinisikan sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari sekumpulan entitas pelaku (aktor), kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang yang mempengaruhi arah perkembangan inovasi dan difusinya, serta proses pembelajarannya. Sebagaimana pendapat Leeuwis (2004) yang menyatakan bahwa perubahan dan inovasi bukan merupakan hasil dari perencanaan. Perubahan dan inovasi merupakan sesuatu yang kacau, rumit, dan tidak bisa diprediksi sehingga tidak bisa direncanakan. Kesulitan dalam merencanakan inovasi dapat disiasati melalui sistem inovasi.

Dalam tataran regional atau kabupaten, sistem inovasi dikembangkan melalui konsep Sistem Inovasi Daerah yang merupakan turunan dari Sistem Inovasi Nasional. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadi instrumen pemerintah dalam menumbuhkembangkan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang menuntut adanya peningkatan kapasitas inovatif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemda, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam konteks pembangunan pertanian terutama pertanian tanaman pangan, keunggulan bersaing merupakan salah satu syarat mutlak bagi eksistensi dan pertumbuhan berkelanjutan pertanian dalam tatanan pasar persaingan bebas era globalisasi. Daya saing pada dasarnya ialah kemampuan lebih baik dari pesaing dalam hal menghasilkan barang dan jasa sesuai preferensi konsumen. Preferensi konsumen dicerminkan oleh atribut produk seperti : jenis, mutu, volume, waktu dan harga. Semua ini sangat ditentukan oleh basis kegiatan produksi. Keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan inovasi yang sangat ditentukan oleh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan faktor-faktor yang dapat mendukung pembangunan pertanian tanaman pangan serta kendala-kendala atau masalah-masalah yang dapat menghambat perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Penelitian ini juga menganalisis tentang inovasi dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan telaah dokumen. Teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan dengan beberapa pertanyaan terbuka, sedangkan telaah dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari informan dan dokumen. Informan merupakan orang atau responden yang dianggap mengetahui permasalahan pembangunan pertanian tanaman pangan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kasubag Perencanaan, Kabid Pengelolaan Lahan, Air, Sarana dan Prasarana, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Kepala UPT Majenang. Informan lainnya adalah pegawai Bappeda Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kasubag Perencanaan, Staf Perencanaan serta Kasubid Litbang. Selanjutnya adalah informan dari pegawai Kecamatan yaitu Camat Karangpucung, dan Staf Kecamatan Karangpucung serta unsur petani atau kelompok tani. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian antara lain perundang-undangan, peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, laporan-laporan dan arsip-arsip tentang perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan seperti RPJMD, Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Periode 2012 - 2017, dan Rencana Kerja Disperanak Tahun 2016, Dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang 2016 Kabupaten Cilacap. Melalui dokumen dilakukan pengambilan data yang terkait dengan perencanaan pembangunan tanaman pangan.

Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi melalui pengecekan data hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan model interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,

yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Proses perencanaan pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan di Kabupaten Cilacap menggunakan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan teknokratik, pendekatan *top down*, pendekatan *bottom up*, dan pendekatan partisipatif. Pendekatan teknokratik dari perencanaan pembangunan pertanian dilakukan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap dalam menyusun rancangan awal rencana kerja yang akan dijadikan acuan dalam musrenbang. Pendekatan *top down*, *bottom up* dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dapat dilihat dari kegiatan musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan hingga tingkat kabupaten yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* yang terkait dalam perencanaan pembangunan pertanian yang tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.

Perencanaan pembangunan pertanian merupakan perencanaan pembangunan daerah di sektor atau bidang pertanian. Perencanaan pembangunan pertanian di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap dituangkan dalam dokumen perencanaan, antara lain Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap. Substansi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap mengacu pada RPJMD, RPJPD, dan RKPD Kabupaten Cilacap

Rencana Strategis yang dijadikan sebagai dasar dari perencanaan merupakan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 yang didalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan pertanian. Penyusunan rencana strategis sangat penting karena merupakan langkah awal dalam penentuan tujuan pembangunan pertanian. Tujuan tersebut digunakan sebagai arah dan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Tahap kedua dalam proses perencanaan adalah pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam perencanaan. Data merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan. Proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan Dispersanak Kabupaten Cilacap merupakan pendekatan teknokratik. Proses tersebut dilakukan oleh bidang dan UPT yang ada di Dispersanak.

Selain data yang berasal dari lapangan, evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi

mengenai ketersediaan anggaran juga dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan pertanian tahun berikutnya. Data juga bisa didapatkan melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat.

Proses perencanaan dengan pendekatan *bottom up* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan khususnya pertanian tanaman pangan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui forum koordinasi musrenbang dari mulai tingkat desa/ kelurahan hingga tingkat kabupaten.

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Cilacap Tahun 2016

No	Tahapan Kegiatan Musrenbang	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Musrenbang Desa / Kelurahan	Bulan Januari (2016)	Kepala Desa / Kelurahan
2.	Musrenbang Kecamatan	Bulan Januari-Februari 2016	Camat
3.	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Bulan Februari-Maret 2016	Tim Penyelenggara dan Kepala SKPD
4.	Musrenbang Daerah Kabupaten	Bulan Maret 2016	Tim Penyelenggara dan Kepala Bappeda

Sumber: Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 050/158/27/Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Perencana Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016 Kabupaten Cilacap

Penentuan program dan kegiatan pembangunan dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga dibutuhkan prioritas mana yang penting dan mendesak. Dispersanak Kabupaten Cilacap melakukan forum koordinasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. Forum tersebut bertujuan untuk membahas dan mencari kesepakatan usulan-usulan yang akan dijadikan prioritas program dan kegiatan Dinas. Penentuan skala prioritas ini berdasarkan data, informasi dan hasil verifikasi di lapangan.

Perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Cilacap Tahun 2016 menghasilkan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Dispersanak Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 sebanyak 11 program. Program dan kegiatan tersebut terbagi menjadi satu urusan wajib dan 10 urusan pilihan. Untuk yang berhubungan langsung dengan pembangunan pertanian tanaman pangan sebanyak 4 program yaitu satu program urusan wajib dan tiga

urusan pilihan. Program dan kegiatan prioritas pada perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2016 lebih banyak pada peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 2 Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Dispertanak Tahun 2016

No.	Program	Jumlah Pagu (Rupiah)
1	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian - Pengadaan alsintan - Peningkatan infrastruktur lahan dan air 	14.896.000.000
2	Program peningkatan produksi pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan Pembuatan JITU - Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama - Pengadaan Pupuk - Penyusunan Detail Engineering Design (DED) - Pengembangan Bibit Unggul 	12.800.000.000
3	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan database potensi produksi pangan - Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan - Penanganan pasca panen dan Pengolahan hasil pertanian - Pengembangan pertanian pada lahan kering 	3.900.000.000
4	Program peningkatan kesejahteraan petani <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan lembaga petani - Peningkatan kemampuan lembaga petani P3A, GP3A, dan IP3A - Peningkatan kemampuan lembaga petani UPJA 	300.000.000

Sumber : Dispertanak Kabupaten Cilacap, 2016

Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap mengacu pada beberapa peraturan, antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut, ada beberapa peraturan daerah yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah secara umum, yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; serta

Perda Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2 Pembahasan

Dispertanak Kabupaten Cilacap sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian dan peternakan ikut bertanggung jawab dalam tercapainya pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan di Kabupaten Cilacap. Perencanaan pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan diperlukan sebagai pedoman dan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Cilacap. Dispertanak melakukan perencanaan pembangunan pertanian melalui penyusunan rencana strategis yang merupakan rencana jangka menengah dan rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja. Perencanaan pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya, secara normatif mekanisme perencanaan mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN.

Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap didominasi oleh pendekatan teknokratik dan *top down planning*. Pendekatan teknokratik terlihat dari usulan program dan kegiatan Dispertanak hampir 90 persen merupakan usulan dari Dinas sedangkan sisanya sekitar 10 persen merupakan usulan *stakeholder* yang dapat diakomodir Dinas. Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap melibatkan *stakeholder* yang terkait dalam pembangunan pertanian melalui suatu forum musrenbang. Musrenbang dilaksanakan di tingkat desa hingga tingkat kabupaten untuk menjaring usulan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan. Agar usulan dan kebutuhan sesuai dengan koridor pembangunan pertanian maka forum tersebut harus mengacu pada visi dan misi pertanian Kabupaten Cilacap. Hal ini menunjukkan bahwa musrenbang masih didominasi perencanaan *top down* karena sebagian besar usulan merupakan usulan dari Dinas bukan dari masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan perencanaan pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan Kabupaten Cilacap mengacu pada RPJMD dan visi dan misi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap.

Pengumpulan dan analisis data yang relevan dan mendukung perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap perlu mempertimbangkan potensi daerah Kabupaten Cilacap, hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya,

data lapangan yang diperoleh UPT, proposal yang diajukan masyarakat, anggaran dan regulasi serta strategi dan kebijakan yang ada dalam penyusunannya.

Dalam aktivitas perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap, penerapan prinsip-prinsip koordinasi adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi, Prinsip komunikasi yang baik merupakan usaha dimana semua stakeholder yang terlibat dapat menyampaikan berbagai ide agar diperoleh persamaan persepsi. Komunikasi sudah dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap, yang dibuktikan dengan proses musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan hingga kabupaten. Pada pelaksanaan musrenbang tersebut segenap stakeholder yang terlibat menyampaikan ide-ide dan usulan-usulannya untuk mencapai titik temu bersama dan memiliki persamaan persepsi.
- b) Integrasi, Prinsip integrasi dalam proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara integratif antara Dispertanak dengan BP2KP. Meskipun demikian, dalam praktiknya, integrasi kegiatan antara Dispertanak dan BP2KP masih belum berjalan dengan optimal akibat adanya kendala di lapangan. Beberapa PPL (BP2KP) masih susah diajak kerjasama dengan UPT (Dispertanak) karena faktor ego sektoral seperti dalam hal pengumpulan data dasar pertanian di wilayah Kecamatan.
- c) Sinkronisasi, Prinsip sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap ditunjukkan melalui kegiatan musrenbang yang merangkul berbagai stakeholder dan mampu menjembatani (mensinkronisasikan) berbagai kepentingan dari para stakeholder tersebut. Akan tetapi, prinsip sinkronisasi masih belum sepenuhnya diterapkan secara komprehensif dalam pelaksanaan musrenbang mengingat masih adanya *stakeholder* vital yang justru belum dilibatkan dalam musrenbang, yakni kelompok tani. Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Cilacap melibatkan masyarakat secara umum seperti tokoh masyarakat akan tetapi belum melibatkan petani atau kelompok tani secara khusus. Perlunya dilakukan sinkronisasi adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan atau menyelaraskan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas/ kerja. Sebagai akibat dari belum dilibatkannya petani atau kelompok tani, aspirasi dari masyarakat belum terakomodir dengan baik. Oleh karena itu, perlunya koordinasi untuk

menjembatani keinginan masyarakat dengan orientasi tujuan pembangunan pertanian.

- d) Simplifikasi, Forum musrenbang pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap mampu menjadi ajang untuk menyederhanakan berbagai kepentingan pembangunan pertanian tanaman pangan yang berasal dari usulan-usulan berbagai *stakeholder*. Mekanisme simplifikasi kepentingan atau kegiatan ini dilakukan dengan berdasarkan atau mengacu pada arah kebijakan pembangunan pertanian nasional dan daerah, asas kemanfaatan bagi masyarakat petani secara luas, skala prioritas (tingkat urgensi), dan ketersediaan anggaran. Prinsip ini dapat terlihat dari proses seleksi usulan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan Dispertanak Kabupaten Cilacap. Melalui seleksi usulan kegiatan dipilih berdasarkan tingkat urgensi atau skala prioritas dan azas kemanfaatan bagi masyarakat.

Perencanaan partisipatif dengan pendekatan *top down* dan *bottom up* memungkinkan masyarakat untuk dapat memberikan usulan kegiatan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka. Tetapi tidak semua usulan kegiatan dapat terealisasi menjadi kegiatan perencanaan, karena adanya keterbatasan sumber daya. Jadi, dari berbagai usulan yang masuk perlu ditentukan kegiatan prioritas yang memang lebih penting dan mendesak.

Penentuan program dan kegiatan prioritas merupakan hasil kesepakatan semua peserta musyawarah melalui pembahasan dalam rapat koordinasi. Penentuan prioritas ini dilakukan untuk memilih program dan kegiatan yang dianggap lebih penting dan perlu untuk didahulukan jika dibandingkan dengan program dan kegiatan lainnya.

Penentuan program dan kegiatan prioritas merupakan hasil kesepakatan semua peserta musyawarah melalui pembahasan dalam rapat koordinasi. Penentuan prioritas ini dilakukan untuk memilih program dan kegiatan yang dianggap lebih penting dan perlu untuk didahulukan jika dibandingkan dengan program dan kegiatan lainnya.

Usulan program dan kegiatan Dispertanak merupakan solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pertanian tanaman pangan. Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, permasalahan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap lebih banyak mengenai sarana dan prasarana pertanian. Oleh karena itu, prioritas program dan kegiatan Dispertanak mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana pertanian yaitu rehabilitasi dan pembuatan irigasi.

Faktor-faktor yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap adalah:

- a) Aspek hukum, yaitu regulasi atau peraturan yang dijadikan dasar atau acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Adanya regulasi dan peraturan ini mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih jelas dan terarah. Selain itu, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap mengacu pada peraturan mengenai perencanaan pembangunan daerah antara lain: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; serta Perda Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b) Aspek geografis dan demografis, yaitu sumber daya alam dan penduduk Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan potensi pertanian yang cukup tinggi. Lahan sawah di Kabupaten Cilacap cukup luas mencapai 30 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Cilacap yang sangat berpotensi untuk pertanian tanaman pangan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Cilacap bekerja di bidang pertanian Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian terutama tanaman pangan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Cilacap. Ada kesesuaian antara sumber daya alam yang ada dengan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek geografis dan demografis Kabupaten Cilacap merupakan faktor lingkungan yang berasal dari dalam wilayah Kabupaten Cilacap sendiri (internal) yang dapat mendukung perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap.

Dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap masih ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Faktor-faktor yang dapat menghambat dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap:

- a) Aspek Pendanaan, yaitu dana yang disediakan untuk pembangunan pertanian tanaman pangan. Dengan

kondisi keuangan yang tersedia yaitu keterbatasan dana untuk proses pembangunan ini, maka akan menimbulkan hambatan bagi perencanaan itu sendiri. Adanya keterbatasan dana yang disediakan untuk pembangunan bidang pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap menyebabkan tidak semua usulan kegiatan dari masyarakat dapat dilaksanakan. Dana yang dibutuhkan dalam pembangunan pertanian tanaman pangan sejumlah dengan usulan kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun. Akan tetapi dari usulan yang diajukan tidak sampai separuh dana yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perencanaan. Di sinilah peran musrenbang sangat berpengaruh dalam menentukan program dan kegiatan yang harus diprioritaskan. Kegiatan pembangunan di lingkungan Dispertanak sifatnya berkelanjutan, hal ini dikarenakan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan terbatas, maka perencanaan kegiatan tahunan yang dilaksanakan biasanya didasarkan pada perencanaan tahun sebelumnya dengan menyesuaikan aspirasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan.

- c) Aspek Sumber Daya Manusia, yaitu sumber daya manusia perencana dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap. Kurangnya sumber daya manusia perencana secara kualitas dan kuantitas di lingkungan pemerintah daerah terutama Dispertanak Kabupaten Cilacap dapat menghambat proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Mengingat telah diberlakukannya jabatan fungsional perencana dan penyelenggaraan diklat perencana oleh Bappenas, maka instansi perencana di daerah sudah dapat mengembangkan sumberdaya aparat perencana. Kondisi yang ada pada saat ini, Dispertanak Kabupaten Cilacap masih belum memiliki tenaga fungsional perencana, sehingga kualitas perencanaan pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan juga belum optimal. Kurangnya sumberdaya manusia (aparatur) pada Dispertanak tidak hanya terjadi pada tenaga fungsional perencana, namun juga kurangnya aparatur yang bertugas di UPT-UPT. Dengan potensi pertanian Kabupaten Cilacap yang cukup besar, sudah seharusnya setiap kecamatan memiliki UPT tersendiri sebagai perwakilan Dispertanak di tingkat kecamatan. Selain sumber daya manusia perencana, masyarakat Kabupaten Cilacap terutama petani yang sebagian besar masih pendidikannya rendah juga menjadi penghambat dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Pada kenyataannya petani sebagai pelaku pembangunan tidak paham akan pentingnya musrenbang sehingga sebagian besar kegiatan yang diusulkan masih bersifat fisik dan

sangat sedikit yang berhubungan dengan pertanian itu sendiri.

- d) Koordinasi Lapangan, kurangnya koordinasi antar petugas lapangan dapat menghambat perencanaan. Masih ada beberapa PPL yang tidak mau bekerja sama sehingga mempersulit pegawai UPT dalam pengumpulan data. Hal tersebut dikarenakan adanya ego sektoral pada masing-masing instansi karena memang keduanya tidak terhubung oleh garis komando secara langsung. Sebagian PPL menganggap bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada UPT maupun Dispertanak. Sebaliknya UPT juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa PPL agar bersedia bekerja sama dan berkoordinasi dengannya.
- e) Teknologi dan Inovasi; Salah satu upaya yang penting untuk diperhatikan dalam proses perencanaan adalah harus mengikuti perkembangan yang ada, baik perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai perkembangan tersebut juga menuntut para perencana pembangunan untuk terus berinovasi. Inovasi dan penggunaan teknologi bukan hanya sekadar pada penggunaan alat, melainkan juga pada teknik dan pendekatan manajemen yang digunakan. Satu hal yang mutlak diperlukan dalam mendorong lahirnya inovasi-inovasi dan penerapan teknologi adalah kemampuan sumberdaya manusia yang mendukung dan mampu berimprovisasi secara optimal. Penggunaan inovasi dan teknologi yang ada selama ini masih belum optimal karena belum diimplementasikan secara massal. Penggunaan inovasi dan teknologi masih parsial dan masih bersifat sebagai pilot project, sehingga belum terlihat dampak nyata penggunaan inovasi dan teknologi terhadap kemajuan pembangunan pertanian di Kabupaten Cilacap.

5. Kesimpulan

Proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap didominasi oleh pendekatan teknokratik dan *top down planning*. Proses perencanaan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a) Perumusan tujuan perencanaan; Perumusan tujuan perencanaan pembangunan pertanian Kabupaten Cilacap mengacu pada RPJMD dan visi dan misi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap;
- b) Pengumpulan dan analisis data; Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap perlu mempertimbangkan potensi daerah Kabupaten Cilacap, hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya, data lapangan yang

diperoleh UPT, proposal yang diajukan masyarakat, anggaran dan regulasi serta strategi dan kebijakan yang ada dalam penyusunannya;

- c) Koordinasi dalam perencanaan pembangunan antar stakeholder melalui musrenbang masih ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya keterlibatan kelompok tani sebagai stakeholder vital dan kurangnya integrasi antara Dispertanak dan BP2KP sehingga perlu melibatkan kelompok tani dalam proses perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan. Karena kelompok tani merupakan wadah komunitas masyarakat petani yang menjadi pusat semua aktivitas petani mulai dari musrenbang, pendampingan program-program dan kegiatan pembangunan pertanian;
- d) Penentuan program dan kegiatan prioritas; Penentuan program dan kegiatan prioritas merupakan hasil kesepakatan semua peserta musyawarah melalui pembahasan dalam rapat koordinasi; dan
- e) Faktor-faktor yang mendukung proses perencanaan adalah aspek regulasi, aspek geografis dan demografis dari Kabupaten Cilacap. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat proses perencanaan adalah aspek pendanaan, aspek sumber daya manusia, koordinasi lapangan serta teknologi dan inovasi. Oleh karena itu, perlu penambahan kuantitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia perencana di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap serta pegawai tingkat UPT. Penambahan sumber daya manusia perencana dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai pada Dispertanak Kabupaten Cilacap melalui Diklat Jabatan Fungsional Perencana. Selain itu, perlu melakukan pemetaan potensi pertanian tanaman pangan sebagai penunjang sehingga mempermudah dalam analisis data. Pemetaan potensi digunakan sebagai dasar penentuan Satuan Wilayah Pembangunan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan Kabupaten Cilacap belum mempertimbangkan inovasi teknologi secara optimal.

- a) Kabupaten Cilacap belum memiliki sistem inovasi teknologi pertanian tanaman pangan karena sistem inovasi daerah yang dijadikan sebagai acuan belum ada; dan
- b) Inovasi belum diterapkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Cilacap. Sehingga perlu dibuat roadmap SIDA Kabupaten Cilacap khususnya yang terkait dengan inovasi teknologi pertanian tanaman pangan. Selain itu, perlu disusun grand design, mempersiapkan sumber daya manusia dan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, serta

infrastruktur pendukung lainnya, sehingga ke depan SIDA dapat digunakan sebagai sistem inovasi, yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. (2005). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2012). Pengantar Penguatan Sistem Inovasi. *Makalah dalam Seminar 'Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Malang'*, Malang, 2 Mei 2012.
- Banoewidjojo, Moeljadi. (1983). *Pembangunan Pertanian*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Campbell, Scott and Fainstein, Susan. (1996). *Readings in Planning Theory*. UK: Blackwell Publisher.
- Faludi, Andreas. (1973). *Planning Theory*. Oxford: Pergamon Press.
- Kuncoro. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Leeuwis, Cees. (2004). *Communication for rural Innovation: Rethinking Agriculture Extension*. UK: Blackwell Science Ltd.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3*. California: Sage Publications, Inc.
- Mumford et al. (2008). Planning for Innovation: a Multi-level Perspective. *Research in Multi-Level Issues*, Volume 7, pp. 107-154.
- Noor, Irwan. (2013). *Desain Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekartawi. (1995). *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik, TA. (2010). *Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional*. Jakarta: Dewan Riset Nasional.
- Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan Jilid 1. Terjemahan Munandar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.